BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN
Subyek : PLTN Muria
Edisi : 12/September/2007
Hari : Rabu
Halaman : 6

Menneg LH: PLTN Muria Belum Punya Amdal

[JAKARTA] Rencana pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, ternyata belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH), Rachmat Witoelar menegaskan, sampai saat ini tidak ada satu dokumen Amdal tentang PLTN Muria yang dikeluarkan Kementerian LH.

"Bahkan kami belum menerima permintaan apa pun terkait Amdal PLTN Muria," tegas Rachmat Witoelar saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Selasa (11/9) malam.

Penegasan Rachmat Witoelar itu menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Sonny Keraf. Sonny yang mantan Menteri KLH itu meminta agar sosialisasi pembangunan PTLN di Muria dihentikan karena tidak memiliki dasar hukum khususnya Amdal.

"Saya heran dengan sikap Pak Kusmayanto (Menteri Negara Riset dam Teknologi) yang seolah-olah sudah menyatakan proyek PLTN itu akan dibangun di Muria, padahal Amdal sama sekali tidak ada. Jadi saya minta dihentikan dulu," tegasnya.

Haram

Seperti diberitakan, penolakan masyarakat terkait rencana pembangunan PLTN Muria kembali marak awal bulan ini. Aksi warga Jepara itu disampaikan saat Menteri Negara Riset dan Teknologi datang ke Jepara dan berdialog dengan masyarakat.

Bahkan, ulama-ulama yang tergabung dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) cabang Jepara mengeluarkan fat- wa haram untuk pembangunan industri raksasa tersebut.

Sikap NU ini disambut gembira masyarakat dan beberapa elemen masyarakat. Organisasi lingkungan hidup dunia, Greenpeace, mengatakan, pihaknya menolak rencana pemerintah membangun PLTN, karena akan mengancam lingkungan dan keselamatan masyarakat lokal.

Juru Kampaye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Nur Hidayati, menilai keputusan mengharamkan PLTN Muria diambil setelah para ulama dan pemuka agama menganalisis secara mendalam usulan pemerintah dan menyimpulkan bahwa bahaya dari PLTN terutama terkait dengan bahaya limbah radioaktif dan tidak adanya jaminan keamanan yang akan mengancam kelangsungan hidup masyarakat lokal lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

"Keputusan ulama sangatlah tepat, karena warga Jepara sudah mulai resah dan tegang akibat pengumuman pemerintah bahwa mereka akan mendorong rencana PLTN. Para ulama ini tidak hanya menunjukkan keberpihakan pada nasib warga, namun juga membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya yang mengalami degradasi akibat keputusan sepihak yang dilakukan elit politik," ujar Nur Hidayati.

Sedangkan juru bicara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Torry Kuswardono, mengatakan, pembangunan PLTN hanya akan menambah risiko bencana, karena hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang tidak memiliki risiko gempa bumi.

Dia mencontohkan, insiden kecelakaan lepasnya radiasi nuklir di PLTN Kashizawaki-Kariwa, Jepang, bulan Juli lalu, memperlihatkan tidak ada satu pun desain PLTN dapat mengatasi fenomena alam, seperti gempa bumi. [E-7]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup